

NAMA MEDIA : **Jateng Pos**
TANGGAL : **31 Oktober 2023**
KATEGORI : **Hukum Tata Negara**



DPRD Sleman Susun Rencana Aksi Pencegahan Narkoba

SLEMAN - Kasus penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sleman kian merebak. Tidak hanya sasaran yang semakin luas, jumlah penggunaannya pun terus bertambah.

Eksistensi Sleman sebagai kota pelajar alih-alih ditangkap sebagai ceruk pasar oleh para penjual narkoba. Kebanyakan korban peredaran barang haram tersebut adalah anak muda. Kondisi ini memantik keprihatinan wakil rakyat yang duduk di DPRD Sleman.

Menjelang akhir tahun 2023 ini, pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) dan Prekursor Narkotika mulai berlangsung. Raperda inisiatif DPRD itu memuat 33 pasal yang utamanya fokus pada rencana aksi daerah.

"Kami prihatin melihat semakin meluasnya kasus narkoba di Sleman. Untuk itu perlu penguatan landasan hukum di tiap SKPD agar bisa menanggulangi permasalahan tersebut," kata Ketua Pansus Pembahas Raperda P4GN Sleman, Arif Priyo Susanto saat dikonfirmasi Suara Merdeka, Senin (30/10).

Dia menjelaskan, dalam raperda yang tengah dibahas, penekanan rencana aksi terletak pada upaya pencegahan. "Kalau untuk penanggulangannya, penegak hukum sudah punya SOP sendiri sesuai aturan perundangan. Kita pemerintah daerah punya kewajiban untuk melakukan rencana aksi dalam rangka pencegahan," tambahnya.

Rencana aksi ini salah satunya membentuk tim tingkat kabupaten yang terdiri dari masing-masing SKPD. Nantinya secara komprehensif setiap SKPD akan melakukan program



Ketua Pansus Pembahas Raperda P4GN, Arif Priyo Susanto

pencegahan dan penyalahgunaan narkoba.

Dia memberikan contoh di Dinas Sosial, selain sosialisasi juga ada program rehabilitasi sosial sedangkan Dinas Kesehatan menyangkut layanan rehabilitasi medis. Contoh lainnya adalah instansi Dinas Pendidikan yang membuat program sosialisasi pencegahan narkoba di sekolah. Untuk mengantisipasi peredaran narkotika di kalangan generasi muda, Dinas Pemuda dan Olahraga juga dilibatkan melalui sosialisasi kepada komunitas pemuda.

"Selama ini sudah ada program pencegahan narkoba di SKPD tapi belum dalam bentuk rencana aksi daerah. Jadi lewat raperda ini kita ingin memperkuat," ujar politisi Gerindra itu.

Rencana aksi itu nantinya akan diteruskan sampai tingkat kapanewon dan kalurahan. Jika sudah ada rencana aksi daerah, otomatis bakal ada penguatan anggaran. "Sekarang ini pembahasannya baru legal drafting dari kemenkumham. Tapi kita wajibkan selesai tahun ini karena merupakan agenda prolegda 2023," tandas Arif.(J1)